

Evaluation of The Implementation of The Meskom Village Direct Cash Assistance Program, Bengkalis District

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Meskom Kecamatan Bengkalis

Sulaiman Akmal^{1*}, Budi Mulianto²

Universitas Islam Riau^{1,2}

sulaimanakmal@soc.uir.ac.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

Based on initial observations of the Implementation of Direct Cash Assistance in Meskom Village, the authors found phenomena including: 1) There was still a lack of communication between data collection officers and the community; 2) Inadequate supervision in the implementation of BLT; 3) The problem of socializing the criteria for those who are entitled to receive BLT. Dunn in (Nugroho 2003) Public policy evaluation indicators are as follows: 1) The effectiveness of whether the desired results have been achieved; 2) Efficiency how much effort is required to achieve results; 3) Adequacy of how far the achievement of results in solving problems; 4) Equalization whether benefits costs are distributed evenly; 5) Responsiveness whether the policy results satisfy needs; 6) Determination of whether the desired result (goal) is useful/worth it. The research method used by researchers in this study is a qualitative method. According to Creswell (2016) qualitative research is a type of research that explores and understands the meaning in a number of individuals or groups of people that originate from social problems. The results showed that of the six (6) assessment indicators, the BLT program in Meskom Village, Bengkalis District, starting from data collection communication, monitoring carried out by the village head and village administration and program assistants, and outreach carried out by the village government and the task force went according to what is expected is that there are only a few obstacles or obstacles that occur, considering that not everything we plan can go according to what we want. The conclusions of this study indicate that the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) in Meskom Village, Bengkalis District, is running as expected, even though there are a few obstacles.

Keywords: Evaluation, Program & Direct Cash Assistance

ABSTRAK

Berdasarkan pengamatan awal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Meskom penulis temukan fenomena diantaranya: 1) Masih kurangnya Komunikasi petugas pendataan dengan masyarakat; 2) Pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan BLT; 3) Permasalahan sosialisasi kriteria yang berhak menerima BLT. Dunn dalam (Nugroho 2003 Indikator evaluasi kebijakan public sebagai berikut: 1) Efektifitas apakah hasil yang diinginkan telah tercapai; 2) Efisiensi seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil; 3) Kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil dalam memecahkan masalah; 4) Perataan apakah biaya mamfaat didistribusikan dengan merata; 5) Responsivitas apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan; 6) Ketetapan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan berguna/bernilai. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keenam (6) indikator penilaian tersebut program BLT di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis, mulai dari komunikasi pendataan, pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan pemerintahan Desa serta pendamping program, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan satgas berjalan sesuai dengan yang diharapkan hanya saja ada sedikit kendala atau halangan yang terjadi, mengingat tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) di desa Meskom Kecamatan Bengkalis berjalan dengan atau sesuai yang diharapkan walau pun ada sedikit kendala.

Kata Kunci: Evaluasi, Program & Bantuan Langsung Tunai

1. Pendahuluan

Pemerintahan (*Governance*) adalah proses pemenuhan kebutuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat

disebut pemerintah, maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dan aktivitasnya, maka terbentuklah system Administrasi dan birokrasi mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau Public Service. Oleh karena itu jelas fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggaraan terbagi menjadi tiga (3) yaitu: 1) Fungsi pelayanan; 2) Fungsi pemberdayaan dan 3) Fungsi pembangunan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat. Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Indonesia.

Penyaluran bantuan social yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2009 (3) merupakan representasi kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan social di Indonesia. UU tersebut menerangkan untuk mencapai kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia maka dialokasikan bantuan/hibah social kedalam anggaran belanja negara/daerah di Indonesia. Penyaluran bantuan social, yang diatur dalam UU tersebut adalah untuk rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social, Belanja bantuan social di definisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifat nya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Definisi tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011. Klasifikasinya diatur dalam PP no 45 2013. (4)

Perlu diketahui akibat pandemic Covid-19 pemerintah menerbitkan Permendesa, PDDT Nomor 6 tahun 2020 yang mana inti perubahannya mengatur tentang penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk: 1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; 2) Padat karya tunai desa; dan 3) Bantuan langsung tunai.

Dengan prioritas penggunaan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada keluarga miskin yang dianggap paling berdampak pandemi Covid-19. Rumusan kebijakan ini berdasarkan pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No 6 tahun 2014. Kebijakan ini merupakan bentuk dari keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk mempercepat pembangunan fisik maupun non fisik di Desa. (5)

Berdasarkan pengamatan awal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Meskom penulis temukan fenomena diantaranya: 1) Masih kurangnya Komunikasi petugas pendataan dengan masyarakat; 2) Pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan BLT; 3) Permasalahan sosialisasi kriteria yang berhak menerima BLT

Berdasarkan fenomena peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Tunai di Desa meskom Kecamatan Bengkalis" Dari latar belakang dapat diambil rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah komunikasi petugas pendataan dengan masyarakat.; 2) Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan; 3) Bagaimanakah Sosialisasi kriteria yang berhak menerima BLT.

2. Tinjauan Pustaka

Pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang setelah ditambah awalan "pe" menjadi kata "Pemerintah" dan Ketika mendapat akhiran "an" menjadi kata "Pemerintahan". Pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan Pemerintahan Berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafi'i: 2011). Dalam kata dasar "Perintah" sedikitnya ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu: a) Ada dua

pihak yang terlibat; b) Yang pertama yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah; c) Yang kedua yang diperintah atau rakyat; d) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafi'i: 2011).

Menurut (Ndraha, 2011) pemerintah merupakan badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif) pengaturan (Legislatif), Kepemimpinan dan Koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Syafi'e juga mendefinisikan pemerintahan yang berasal dari kata pemerintah, yang juga diambil dari kata "pemerintah", ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki ketaatan (Syafi'i, 2017).

(Sadu, 2015) mengatakan bahwa kata "Government" atau pemerintah memiliki pengertian yang sangat luas, kata tersebut dapat mencakup orang atau badan yang secara politik diberi kewenangan memerintah suatu entitas tertentu, atau sebuah kiat dalam menjalankan proses memerintah, ataupun sebuah system atau kebijakan memerintah, tetapi kata tersebut juga dapat menunjuk pada administrasi atau manajemen dari suatu organisasi yang menjalankan fungsi memerintah suatu entitas politik tertentu.

Salah satu fungsi pemerintahan adalah pelayanan, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya system pemerintahan (Syaprianto, 2018).

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha; 2015), istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui Tindakan public. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dan kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan public. Dunn dalam (Nugroho, 2003) Indikator evaluasi kebijakan public sebagai berikut: 1) Efektifitas apakah hasil yang diinginkan telah tercapai; 2) Efisiensi seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil; 3) Kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil dalam memecahkan masalah; 4) Perataan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata; 5) Responsivitas apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan; 6) Ketetapan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan berguna/bernilai.

Evaluasi juga memiliki pendekatan-pendekatan, diantaranya nya : a) Evaluasi semu; b) Evaluasi Formal; c) Evaluasi Keputusan Teoritis. Dan evaluasi juga dengan tekniknya ada empat Teknik Evaluasi antaranya: a) Evaluasi Komparatif; b) Evaluasi Historikal; c) Evaluasi Laboratorium; d) Evaluasi (Ed Hock. Zaini, 2015) mengatakan jika dilihat dari perspektif siklus kebijakan. Evaluasi biasanya dianggap sebagai sebuah proses aktivitas yang biasanya

menyoroti apa yang terjadi setelah sebuah kebijakan public tertentu dilaksanakan atau diimplementasikan atau ditranformasikan kedalam berbagai bentuk kegiatan rutin birokrasi.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan. Program BLT merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu, sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan public dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. persoalan public yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada factor produksi, peluang/kesempatan berusaha, Pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tanggasaran (RTS) sebagai akibat dari adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin.

Tentu peran pemerintah sangat diharapkan dalam suatu perekonomian, sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan social, dan memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dana Desa yang dialihkan menjadi BLT sekitar 31% dari total RP 72 Triliun, yaitu sebesar Rp 22,4 Triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp 600.ribu selama tiga bulan, bulan April, Mei dan Juni hingga total menjadi 1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa. a) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp 800 juta, BLT dialokasikan 25%; b) Desa yang memiliki Dana Desa Rp 800 Juta - Rp 1,2 Miliar, dialokasikan 30%; c) Desa yang memiliki Dana Desa diatas 1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35%.

Kreteria calon penerima BLT adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (Exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Tidak mendapat Bantuan PKH/BPNT/pemilik kartu prakerja; 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan); 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah: 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; 3) Meningkatkan tanggung jawab social Bersama.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Creswell, 2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta

menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai suatu kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010).

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2007) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Interview (wawancara), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. lokasi tersebut peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Informan Penelitian, Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai penelitian Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis.

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1) Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil, wawancara *observasi* atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Meskom di Kecamatan Bengkalis; 2) Data Sekunder, Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

Teknik Pengumpulan Data untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Teknik Observasi; 2) Teknik *Intevew* (wawancara); 3) Teknik Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data menurut Spradley. Menurut Spradley dalam (Moleong, 2014) analisa data tidak terlepas dari keseluruhan penelitian, maka analisa data dapat dilakukan dilapangan bersama dengan pengumpulan data.

4. Hasil Dan Pembahasan

Sebagai perpanjangan tangan tangan pemerintah Pusat pemerintah Desa menjalankan program yang telah di tetapkan pusat dengan ketentuan dan regulasi yang sudah di sepakati, mengkomukasikan dengan masyarakat, mengadakan pengawasan dan sosialisasikan nya dengan perangkat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, mulai dari pendataan sampai pada tahapan pencairan dana yang menjadi program pemerintah pusat dan diteruskan keperintah desa. serta mengatur bagaimana teknik lapangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan Program pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan dan kesulitan masyarakat pada masa Pandemi Covid 19 yang mana pelaksanaan nya diatur dalam Permendesa PDPT terutama pada pandemic covid19.koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah Daerah dan Pusat dilakukan demi terwujudnya kelancaran Pelaksanaan program BLT ini.

Pelaksanaan Program BLT di desa Meskom Kecamatan bengkalis terlaksana atau berjalan sesuai dengan dengan yang diharapkan walaupun masih ada sedikit kendala yang terjadi.

Dari keenam (6) indikator penilaian tersebut program BLT di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis, mulai dari komunikasi pendataan, pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan pemerintahan Desa serta pendamping program, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan satgas berjalan sesuai dengan yang diharapkan hanya saja ada sedikit kendala atau halangan yang terjadi, mengingat tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai yang kita inginkan dari hasil observasi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan diantaranya:

Efektifitas dan Efisiensi, komunikasi program, pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan satgas berjalan sesuai dengan arahan/ mulai dari ketua RT dan RW sampai kepada tingkat Desa dan dilakukan oleh satgas dan bantu oleh RT/RW. hanya saja sampai tingkat desa data yang sudah masuk ada yang dobel atau ganda di karenakan adanya human eror di bagian penginputan data. yang menandakan minimnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki. dan kurang nya SDM pemerintah Desa.

Kecukupan dan pemerataan.

Pendataan dan pengawasan yang dilakukan oleh satgas dan pemerintah Desa sudah berkecukupan ditinjau dari besar jumlah yang diterima BLT dan penerima BLT itupun sudah merata dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan permendesa PDPT dan pengawasan pun dilakukan oleh pendamping program yang selalu ada waktu pencairan dana yang dibagikan kemasyarakat penerima BLT di balai desa Meskom atau pun di kantor kepala Desa. hanya saja sedikit kendala terjadi karena ada data yang ganda atau input data yang dobel dari petugas pendataan. baik itu di tingkat desa maupun Kecamatan.

Responsivitas dan Ketepatan, komunikasi dan Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga yang ada di Desa sudah dilakukan dengan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan membuat pengumuman dan disebarakan kepada masyarakat baik itu ditempat-tempat yang sering didatangi/dikunjungi oleh masyarakat, bahkan perangkat desa berkunjung kemasyarakat melalui ketua RT/RW. Hanya saja respon dari masyarakat ada yang kurang atau masa bodoh dengan program ini. sehingga mereka beranggapan bahwa program BLT ini hanya untuk para perangkat Desa. ada juga yang merespon dengan baik sehingga terlaksana sesuai dengan rencana dan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Disini peneliti berkesimpulan dari keenam Indikator bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung di desa Meskom Kecamatan Bengkalis berjalan dengan atau sesuai yang diharapkan walau pun ada sedikit kendala. dan kendala tersebut dapat terselesaikan dengan oleh perangkat Desa dan Kepala desa sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Mereka merasa terbantu dengan adanya program ini yang disebabkan pandemic Covid 19.

5. Penutup

Kesimpulan

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis peneliti berkesimpulan: 1) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis dilihat dari enam Indikator. peneliti berkesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) di desa Meskom Kecamatan Bengkalis berjalan dengan atau sesuai yang diharapkan walau pun ada

sedikit kendala dan kendala tersebut dapat terselesaikan oleh perangkat Desa dan Kepala Desa sehingga Program penanggulangan kemiskinan dapat dirasakan oleh masyarakat desa; 2) Adanya sedikit kendala yang menghalangi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sehingga kurang dari kesempurnaan yaitu kendala dari perangkat Desa terutama di SDM nya di bidang pendataan. Kurang menariknya sosialisasi yang dilakukan.

Setelah melakukan penelitian ini peneliti menyarankan kepada pemerintah Desa Meskom kecamatan Bengkalis. diantaranya: 1) Kepala Desa seharusnya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya di bidang kepemimpinan sehingga kemajuan Desa tergantung dari gaya kepemimpinannya; 2) peneliti menyarankan ada nya pelatihan maupun pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan SDM, terutama dibidang pendataan dan metode yang digunakan dalam sosialisasi harus lebih menarik sehingga responsivitas masyarakat lebih besar terhadap program yang di jalankan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zaini, (2015), *Teori Kebijakan Publik*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Bungin MB. *Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. 2014;
- Creswell JW, Poth CN. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications; 2016.
- Moleong LJ. Moleong. (2019). *Metod Penelitian Kualitatif*.
- Nugroho, R, (2003). *Kebijakan Publik, Formulas, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elek Media Koputindo,
- Syafi'i, Inu Kencana, (2010), *Pengantar Ilmu pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama.
- Syafi'i, Inu Kencana, (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syaprianto, (2018). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, *Jurnal Wedana IV* :534-39
- Sugiyono D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tashakkori A, Creswell JW. (2007). *The new era of mixed methods*. Vol. 1, Journal of mixed methods research. Sage Publications;. p. 3–7.
- Wasistiono, Sadu, (2015) *Metodologi Ilmu pemerintahan*, Bandung, IPDN Press
- Undang-undang Dasar 1945
- Permendesa Nomor 06 tahun 2020
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2009
- Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2013
- Undang -undang Nomor 06 Tahun 2014